



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

**RENCANA KERJA
(RENJA)-PERUBAHAN
PERANGKAT DAERAH**

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA (DPPKB)
TAHUN 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINASPENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Kol. Wahid Udin No. 260 Lk. I Kelurahan Serasan Jaya - Sekayu (30711)

Telp. (0714) 321084 Fax. (0714) 322149

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR :B-400.13.1/338.A/DPPKB/2025

TENTANG

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA – PERUBAHAN TAHUN 2025
PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, SKPD menyusun rencana strategis sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahunan;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022, perlu disusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2023-2026 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Banyuasin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2023 – 2026 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Tahun 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6422);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Pembangunan Jangka Atas Rencana Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1718);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Berakhir pada Tahun 2022;
15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 40);
17. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021);
18. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 275 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Penjabaran Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 257);
19. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Susunan dan Keanggotaan Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Banyuasin;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : SEKAYU
PADA TANGGAL : 05 MEI 2025

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KAB. MUBA



IRWAN SUSANTO, SE., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19751029 200003 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Musi Banyuasin
Nomor : B-400.13.1/338.A/DPPKB/2025
Tanggal : 05 Mei 2025

Tentang Susunan dan Keanggotaan Tim Penyusunan Dokumen
Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Penanggung Jawab : Kepala Dinas
Ketua : Sekretaris
Sekretaris I : Perencana Ahli Muda

BIDANG KELUARGA BERENCANA

Ketua : KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA
Anggota :

1. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda
2. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda
3. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda

BIDANG KELUARGA SEJAHTERA

Ketua : KEPALA BIDANG KELUARGA SEJAHTERA
Anggota :

1. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda
2. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda
3. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda

BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK

Ketua : KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK
Anggota :

1. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda
2. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda
3. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda

BIDANG PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN

Ketua : KEPALA BIDANG PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN

Anggota :

1. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda
2. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda
3. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda

DITETAPKAN DI : SEKAYU

PADA TANGGAL : JANUARI 2025

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KAB. MUBA



MIRWAN SUSANTO, SE., MM

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19751029 200003 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Kol. Wahid Udin No. 260 Lk. I Kelurahan Serasan Jaya - Sekayu (30711)
Telp. (0714) 321084 Fax. (0714) 322149

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

NOMOR : B-400.13.1/478.B/DPPKB/2025

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2025**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 untuk menjabarkan Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran Organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan pada Perda Nomor 68 Tahun 2016;
- b. bahwa untuk merencanakan program dan kegiatan tahun 2022 dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Banyuasin;
- c. bahwa untuk tujuan dimaksud huruf a dan b diatas, Penetapan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Banyuasin ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- j. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

- m. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 Nomor 11);
- o. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 275 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Banyuasin.
- p. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022);

MEMUTUSKAN

- KESATU : Penetapan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Banyuasin
- KEDUA : Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 dimaksud dalam diktum PERTAMA, sebagaimana terlampir, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SEKAYU
PADA TANGGAL : 25 JUNI 2025

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



MIRWAN SUSANTO, SE., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19751029 200003 1 001

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 dapat tersusun dengan baik.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) Perubahan merupakan acuan kerja dalam melaksanakan kegiatan tahunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Banyuasin, sebagai perwujudan tugas pokok dan fungsi lembaga teknis daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan disusun dengan memperhatikan kewenangan institusi serta perkembangan yang ada dilingkungan internal dan eksternal, sehingga mampu meningkatkan kinerja dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Banyuasin.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Banyuasin diharapkan mampu dilaksanakan sesuai maksud dan tujuan dengan hasil dan keluaran yang baik.

Sekayu, 25 Juni 2025

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



MIRWAN SUSANTO, SE., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19751029 200003 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	
1.2. Landasan Hukum	
1.3. Maksud dan Tujuan.....	
1.4. Sistematika Penulisan	
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan capaian Renstra SKPD	
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi.....	
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD	
3.3. Program dan Kegiatan	
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
BAB V. PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 merupakan acuan kerja untuk masa satu tahun. Di dalam dokumen ini dituangkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Banyuasin berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen ini.

Dalam penyusunan rencana kerja (Renja) Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Banyuasin sebelumnya telah dilakukan Forum PD untuk menjaring usulan-usulan dari bawah dalam hal ini dari tingkat desa, Kecamatan dan masyarakat.

Semua usulan-usulan tersebut ditampung dan diprioritaskan untuk diusulkan dalam musrenbangkab.

Adapun keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD adalah semua usulan dalam Rencana Kerja PD disesuaikan dengan apa yang ada didalam dokumen RKPD, sedangkan terhadap Renstra PD adalah Renstra PD merupakan acuan dalam penyusunan Renja terutama mengenai Program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renja-PD Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 adalah :

- a. Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

- b. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pengendalian Penduduk dan Pembangunan keluarga.
- c. Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- f. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Banyuasin.
- g. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023
- h. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai pedoman dan memberikan arahan bagi seluruh Aparatur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sehingga tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Adapun tujuannya adalah :

1. Sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan.
2. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan tahunan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.
3. Memberikan arahan dan kendali bagi aparatur perencana dalam perumusan substansi perencanaan tahunan yang lebih jelas, rinci dan terukur dan difokuskan pada pencapaian visi dan misi guna efektifitas dan efisisensi pembangunan dengan mengacu pada Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin dengan benar-benar didasarkan pada kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang.
4. Memberikan kejelasan terhadap pembagian wewenang dan tanggung jawab masing-masing bidang dan memacu semangat kerja dalam mengelola tupoksi.
5. Sebagai upaya mengakomodasikan kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan melalui koordinasi, konsultasi dan interaksi baik antar instansi dan sektor.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB. I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA -PD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja -PD Tahun lalu dan capaian Renstra -PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD.
 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD.
 3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional.
 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD.
 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD.
1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
 3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD;
 4. Lampiran tabel Review terhadap rancangan awal RKPD
- 2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
 2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD;

BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja -PD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Pelaksanaan Renja-PD tahun 2025 pada umumnya dapat dilaksanakan dengan baik, adapun capaian Kinerja Renja Tahun 2025 sampai dengan bulan Juni secara fisik rata – rata mencapai 29,38 sedangkan untuk keuangan hanya 28,61%.

Untuk perkiraan capaian pelaksanaan Renja tahun 2025 dapat berjalan sesuai dengan rencana.

Selanjutnya pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun 2025 telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan. Untuk mengetahui lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini :

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKS)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100.00
2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	83%	100.00
2.14.04.2.02	Pelaksanaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00
2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran,	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2%	100.00
2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	52%	100.00

Sekayu, Juni 2025
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KAB. MUBA

MIRWAN SUSANTO, SE, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19751029 200003 1 001

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adapun hasilnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.

Pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan aspek Kesejahteraan masyarakat dan aspek pelayanan umum bidang keluarga berencana di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Musi Banyuasin

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Prangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)		(10)		(12)	(12)	(13)
1.	Persentase Pasangan Usia Subur Yang Menjadi Akseptor KB			88,90	90,12	85,07	85,60	93,06	92,38	82,24		

Nama Indikator		Satuan	Rencana 2024	Realisasi 2024	Capaian
a.	Rata-rata Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per Wanita Usia Subur (15-49 Tahun)	Anak	2,29	2,18	105,04
b.	Persentase Kebutuhan KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	9,70	6,89	140,78
c.	Persentase Penggunaan Modern Contraceptive Rate (Angka Penggunaan Kontrasepsi Modern : Pil, Suntik, IUD, Susuk, MOP dan MOW)	%	70	71,59	102,27
d.	Persentase Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	19,75	13,24	67,03
e.	Persentase Kualitas (Keaktifan) Kelompok BKB, BKR, UPPKA dan PIK-R	%	93,75	88,86	94,78

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan masih terdapat beberapa permasalahan yang harus diselesaikan dalam periode pembangunan lima tahun mendatang.

Dari aspek pengendalian kuantitas penduduk permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

Pertama, masih tingginya laju dan jumlah pertumbuhan penduduk. Walaupun laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Musi Banyuasin cenderung menurun, namun secara absolut jumlahnya tetap besar dan masih akan meningkat setiap tahunnya.

Kedua, masih tingginya tingkat kelahiran penduduk. Berdasarkan hasil Pendataan Keluarga, walaupun TFR cenderung menurun, namun sangat bervariasi antar Kecamatan, menurut kondisi sosial, ekonomi, serta geografis.

Ketiga, Masih rendahnya pemakaian kontrasepsi. Prevalensi pemakaian kontrasepsi (*Contraceptive Prevalence rate/CPR*) masih rendah dan bervariasi antar Kecamatan, tingkat ekonomi, tingkat pendidikan, dan desa-kota.

Keempat, masih tingginya *unmet need*. Jumlah pasangan usia subur yang ingin menunda punya anak atau tidak menginginkan anak lagi tapi tidak ber-KB (*unmet need*). Tingginya *unmet need* mengindikasikan bahwa akses masyarakat terhadap pelayanan kontrasepsi berkurang, atau jenis kontrasepsi yang diminati tidak tersedia.

Kelima, masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran remaja dan pasangan usia subur tentang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Kondisi ini dapat menyebabkan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan dan aborsi yang tidak aman.

Keenam, masih rendahnya partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja serta pemberdayaan ekonomi keluarga.

Ketujuh, masih rendahnya kapasitas kelembagaan Program KB. Hal ini antara lain karena setelah program KB menjadi kewenangan pemerintah daerah, bentuk institusi yang menangani KB di kabupaten/kota sangat beragam, jumlah institusi KB di tingkat lini lapangan berkurang, dan jumlah serta kualitas tenaga pengelola dan pelaksana program KB mulai tingkat pusat sampai tingkat lapangan menurun karena banyak yang dimutasi dan pensiun.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya adalah :

- Keterbatasan dana;
- Tidak semua kegiatan yang ada dalam program dapat dilaksanakan;

Sedangkan tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Banyuasin untuk menganalisis tantangan dan peluang menggunakan metode SWOT sebagai berikut :

Kekuatan (Strength)

- Adanya dana yang cukup
- SDM yang memadai dari segi jumlah dan latar belakang pendidikan
- Struktur organisasi yang jelas
- Adanya landasan hukum yang jelas dan pasti

- Adanya data yang akurat dan valid
- Sarana dan prasarana yang memadai

Kelemahan (Weakness)

- Kurangnya dukungan anggaran
- Sering terlambatnya penyediaan dana berakibat pada tidak tepatnya pelaksanaan tugas sesuai rencana/program.
- Masih kurangnya ethos kerja.

Peluang (Oportunity)

- Adanya data yang akurat memberikan kelancaran penyampaian informasi yang cepat dan tepat.
- Adanya sarana dan prasarana yang mendukung.
- Adanya lembaga swasta yang ikut mendukung kegiatan di lapangan.

Ancaman (Threat)

- Masih banyaknya masyarakat miskin yang belum ikut ber KB
- Masih adanya wilayah yang tidak mudah dijangkau.
- SDM masyarakat masih kurang memahami pentingnya program KB

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Renja.

Dalam melaksanakan review rancangan awal Renja proses yang dilakukan adalah membandingkan antara rancangan awal Renja tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan banyak terdapat perbedaan antara lain :

- Tidak semua kegiatan yang ada dalam rancangan awal Renja dapat dilaksanakan,
- Besarnya dana dalam rancangan awal Renja dengan realisasinya tidak sesuai.

Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Proses perbandingan ini dilakukan untuk melihat sejauh mana usulan yang diusulkan dapat tertampung baik dari jumlah kegiatan maupun besarnya dana yang diberikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses pengusulan Program dan Kegiatan dari masyarakat dilakukan melalui aplikasi SIPD Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, untuk tahun 2025 tidak ada usulan masyarakat yang ditujukan kepada dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui Aplikasi SIPD

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Musi Banyuasin

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Rancangan Awal Renja-PD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan 2025					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran		13,326,131,094					13,326,131,094	
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah		123,713,950					123,713,950	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	2 Laporan	65,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	2 Laporan	65,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD. Penyusunan LKJIP, LLPD dan LKPJ	3 Laporan	20,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD. Penyusunan LKJIP, LLPD dan LKPJ	3 Laporan	20,000,000	
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	38,713,950	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	38,713,950	Dananya Dipindahkan ke Sub Kegiatan Rapat-Rapat Konsultasi SKPD
2	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran		8,198,999,495					8,198,999,495	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	8,198,999,495	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	8,198,999,495	Pergesaran Antar Rekening Belanja
3	Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				193,198,091					193,198,091	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus Hari Tertentu	115 Stel	104,842,400	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus Hari Tertentu	115 Stel	104,842,400	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Kabupaten Musi Banyuasin	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	88,355,691	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Kabupaten Musi Banyuasin	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	88,355,691	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran		890,754,133	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran		890,754,133	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan Pembelian Alat Listrik dan Alat Elektronik Perkantoran	20 Jenis	29,952,255	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan Pembelian Alat Listrik dan Alat Elektronik Perkantoran	20 Jenis	29,952,255	

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	1 Paket	199,176,210	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	1 Paket	199,176,210	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	24 Jenis	49,996,200	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	24 Jenis	49,996,200	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan.	45 Jenis	199,980,343	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan.	45 Jenis	199,980,343	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18 Jenis	84,345,625	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18 Jenis	84,345,625	
	Penyediaan Bahan /Material	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Bahan /Material yang Disediakan	1 Paket	40,000,000	Penyediaan Bahan /Material	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Bahan /Material yang Disediakan	1 Paket	40,000,000	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	49,922,500	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	49,922,500	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Musi Banyuasin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	237,381,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Musi Banyuasin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	237,381,000	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran		3,097,692,000					3,097,692,000	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	1 Unit	3,000,000,000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	1 Unit	3,000,000,000	
	Pengadaan Mebel	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	25 Unit	97,692,000	Pengadaan Mebel	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	25 Unit	97,692,000	
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Disediakan	15 Unit		Pergeseran Dari Sub Keg. MKJP
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		520,729,425					520,729,425	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan.	12 Bulan	223,182,825	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan.	12 Bulan	223,182,825	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan.	12 Bulan	297,546,600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan.	12 Bulan	297,546,600	Penambahan Dana APBD-P
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana BMD		301,044,000					301,044,000	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak Perizinannya.	7 Unit	224,070,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak Perizinannya.	7 Unit	224,070,000	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara / Direhabilitasi	600 M2	63,554,000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara / Direhabilitasi	600 M2	63,554,000	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara / Direhabilitasi. Pemeliharaan AC Split	20 Unit	13,420,000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara / Direhabilitasi. Pemeliharaan AC Split	20 Unit	13,420,000	
II.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan								
1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Persentase Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kab/Kota Dalam Rangka Pengendalian dan Pengendalian Kuantitas Penduduk		66,469,867					66,469,867	
	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Dokumen Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten / Kota.	6 Kegiatan	66,469,867	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Dokumen Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten / Kota.	6 Kegiatan	66,469,867	
2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota										
						Pembinaan dan Pengawasan Sistem Informasi Keluarga	Kab. Musi Banyuasin	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan		Sumber Dana DAK Non Fisik Tahun 2025
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kab. Musi Banyuasin	Jumlah Data dan Informasi Keluarga Yang Tersedia	1 Dokumen	99,338,000	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kab. Musi Banyuasin	Jumlah Data dan Informasi Keluarga Yang Tersedia	1 Dokumen	99,338,000	
						Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kab. Musi Banyuasin	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan		Sumber Dana DAK Non Fisik Tahun 2025
						Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Musi Banyuasin	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan	1 Dokumen		Sumber Dana DAK Non Fisik Tahun 2025
III.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA		Persentase Pasangan Usia Subur Yang Menjadi Akseptor KB								
1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		Advokasi KIE dan Pengendalian Penduduk								

	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	Kab. Musi Banyuasin	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga	4 Jenis	243,983,000	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	Kab. Musi Banyuasin	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga	4 Jenis	243,983,000	
						Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Kab. Musi Banyuasin	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	25 Buah		Sumber Dana DAK Non Fisik Tahun 2025
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kab. Musi Banyuasin	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini	450 Orang	73,466,000	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kab. Musi Banyuasin	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini	450 Orang	73,466,000	Sumber Dana APBD + DAK Non Fisik Tahun 2025
						Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Musi Banyuasin	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1 Laporan		Sumber Dana APBD + DAK Non Fisik Tahun 2025
						Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kab. Musi Banyuasin	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen		Sumber Dana DAK Non Fisik Tahun 2025
						Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kab. Musi Banyuasin	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	20 Organisasi		Sumber Dana DAK Non Fisik Tahun 2025
2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Persentase Kebutuhan KB Yang Tidak Terpenuhi								
						Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab. Musi Banyuasin	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	480 Orang		Sumber Dana DAK Non Fisik Tahun 2025

	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kab. Musi Banyuasin	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1 Laporan	133,116,200	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kab. Musi Banyuasin	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1 Laporan	133,116,200	
3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten / Kota		Persentase Pengendalian, Pendistribusian Obat, Pengendalian dan Peningkatan Kesertaan KB Pria								
	Pengendalian, Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Musi Banyuasin	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	8 Jenis	84,395,000	Pengendalian, Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	8 Jenis	84,395,000	
						Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2501 Orang		
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Musi Banyuasin	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	29 Unit	775,496,800	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Musi Banyuasin	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	29 Unit	775,496,800	
	Pembinaan Pasca Pelayanan KB bagi Peserta KB	Kab. Musi Banyuasin	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB	15 Kecamatan	124,011,000	Pembinaan Pasca Pelayanan KB bagi Peserta KB	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB	15 Kecamatan	124,011,000	
	Dukungan Operasional KB Bergerak	Kab. Musi Banyuasin	Jumlah Akseptor KB Yang Terlayani di 15 Kecamatan. Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	4500 Orang	138,182,700	Dukungan Operasional KB Bergerak	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan	Jumlah Akseptor KB Yang Terlayani di 15 Kecamatan. Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	4500 Orang	138,182,700	
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Musi Banyuasin	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2 Laporan	139,784,498	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2 Laporan	139,784,498	
4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB		Persentase Jumlah Akseptor KB Yang Terlayani								

	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kab. Musi Banyuasin	Jumlah Organisasi Yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	6000 Akseptor	70,523,600	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kab. Musi Banyuasin	Jumlah Organisasi Yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	6000 Akseptor	70,523,600	
	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Kab. Musi Banyuasin	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	1 Laporan	84,150,000	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Kab. Musi Banyuasin	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesertaan Ber-KB	300 Akseptor	84,150,000	
	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Kab. Musi Banyuasin	Jumlah DASHAT di Kampung KB	15 Unit	136,274,997.00	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Kab. Musi Banyuasin	Jumlah DASHAT di Kampung KB	15 Unit	136,274,997.00	
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Kab. Musi Banyuasin	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	34 Kampung	874,566,500.00	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Kab. Musi Banyuasin	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	34 Kampung	874,566,500.00	
IV.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Keluarga Sejahtera								
1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Persentase Pembentukan Kelompok BKB, BKR, PIK-R, BKL dan UPPKS								
						Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Kab. Musi Banyuasin	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	10 Kelompok		Sumber Dana DAK Non Fisik Tahun 2025
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	30 Desa	176,285,000	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Kab. Musi Banyuasin	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	30 Desa	176,285,000	
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Kab. Musi Banyuasin	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	30 Desa	160,842,320	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Kab. Musi Banyuasin	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	30 Desa	160,842,320	Untuk Dana Yang Bersumber Dari APBD Defisiensi Seluruh Sisanya Adalah Dana Dari DAK Non Fisik

	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pelaksana / Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan	Jumlah Kader Yang Mengikuti Orientasi / Pelatihan Teknis Pelaksana / Kader Ketahanan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	15 Kecamatan	154,528,000	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pelaksana / Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	Kab. Musi Banyuasin	Jumlah Kader Yang Mengikuti Orientasi / Pelatihan Teknis Pelaksana / Kader Ketahanan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	15 Kecamatan	154,528,000	
2	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Persentase Pemberdayaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan								
						Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1 Laporan		Sumber Dana DAK Non Fisik Tahun 2025
						Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	1 Laporan		Sumber Dana DAK Non Fisik Tahun 2025

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses pengusulan Program dan Kegiatan dari masyarakat dilakukan melalui aplikasi SIPD Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, untuk tahun 2024 tidak ada usulan masyarakat yang ditujukan kepada dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui Aplikasi SIPD

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada tahun 2025 direncanakan pelaksanaan 4 program dengan 14 kegiatan 51 Sub Kegiatan. Rencana ini diperoleh dari hasil analisis pelaksanaan program dan kegiatan hingga tahun lalu dan hasil usulan dari masyarakat. Hasil analisis terhadap kebutuhan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- c. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- b. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
- c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya

Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f. Penyediaan Bahan / Material
- g. Fasilitas Kunjungan Tamu
- h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b. Pengadaan Mebel
- c. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- b. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- c. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

- a. Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal

Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten / Kota

- a. Pembinaan dan Pengawasan Sistem Informasi Keluarga
- b. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
- c. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
- d. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal

- a. Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangsa Kencana
- b. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana
- c. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)
- d. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal
- e. Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal
- f. Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
- g. Advokasi Program Bangsa Kencana Oleh Pokja Advokasi Kepada Stakeholder dan Mitra Kerja

Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan (PKB/PLKB)

- a. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
- b. Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)

Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten / Kota

- a. Pengendalian, Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
- b. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
- c. Pembinaan Pasca Pelayanan KB bagi Peserta KB

- d. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya
- e. Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak

Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pelaksanaana Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB

- a. Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan KB
- b. Pembinaan Terpadu Kampung ber-KB
- c. Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas
- d. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

- a. Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
- b. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))
- c. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))
- d. Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))

Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

- a. Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
- b. Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Banyuasin dalam melaksanakan rencana kerjanya tahun 2025 telah ditetapkan beberapa program dan kegiatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	NASIONAL			DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA								16.190.029.996,00	15.899.994.282,00	22.894.940.858,00	7.430.078.284,00						25.361.028.835,00		
2		URUSAN PEMERINTAHAN WALIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								16.190.029.996,00	15.899.994.282,00	22.894.940.858,00	7.430.078.284,00						25.361.028.835,00		
2.14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								16.190.029.996,00	15.899.994.282,00	22.894.940.858,00	7.430.078.284,00						25.361.028.835,00		
1.	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran				100 %	100 %		13.616.166.608,00	13.326.131.694,00	12.308.889.970,00	-170.013.048,00						13.446.153.762,00		
	2.14.01.2.01	Pemencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perentase Laporan yang Dilaksanakan Sangat Tepat				100 %	100 %		123.713.950,00	123.713.950,00	51.105.000,00	-72.608.950,00		-	-	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan		435.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan		65.000.000,00	65.000.000,00	41.105.000,00	-23.895.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PAJAK DAERAH	-	-		65.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					3 Laporan	3 Laporan		20.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PAJAK DAERAH	-	-		20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.01.0008	Penyenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen		38.713.950,00	38.713.950,00	0,00	-38.713.950,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-		350.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-		8.455.635.209,00	8.198.999.495,00	9.617.299.450,00	1.566.795.950,00		-	-	Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) DPPKB Kab. Muba		7.768.739.927,00	DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.02.0001	Penyesaian Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	12 Bulan		8.455.635.209,00	8.198.999.495,00	9.617.299.450,00	1.566.795.950,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL DBRI DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBUTUHAN PENGGAJIAN PEKAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	-		7.768.739.927,00	DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Perentase Terevduktre Kapasitas Sumber Daya Aparatur Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD pada DPPKB Kab. Muba				100 %	100 %		193.198.091,00	193.198.091,00	61.677.000,00	-131.521.091,00		-	-	Pegawai DPPKB Kab. Muba		184.842.400,00	DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.05.0002	Pengadaan Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapan				115 Setel	115 Setel		104.842.400,00	104.842.400,00	0,00	-104.842.400,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PAJAK DAERAH	-	-		104.842.400,00	DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikut Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	6 Orang		88.355.691,00	88.355.691,00	61.877.000,00	-26.678.691,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PAJAK DAERAH	-	-		80.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	

			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					45 Jenis	45 Jenis		199.980.343,00	199.980.343,00	100.680.000,00	-99.300.343,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PAJAK DAERAH	-	-					260.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						18 Jenis	18 Jenis		84.345.625,00	84.345.625,00	42.173.000,00	-42.172.625,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PAJAK DAERAH	-	-					84.199.797,00	DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.06.0007		Penyediaan Bahan/Material						1 Paket	1 Paket		40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PAJAK DAERAH	-	-					40.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.06.0008		Facilitasi Kunjungan Tamu						1 Laporan	1 Laporan		49.922.500,00	49.922.500,00	25.000.000,00	-24.922.500,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PAJAK DAERAH	-	-					49.936.000,00	DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						12 Bulan	12 Bulan		237.381.000,00	237.381.000,00	167.274.796,00	-70.106.204,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-					237.416.000,00	DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor					100 %	100 %		3.097.692.000,00	3.097.692.000,00	697.767.200,00	-2.399.924.800,00			-	-		Petengkapan dan Peralatan Kantor DPPKB Kab. Muba			3.167.711.760,00	DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						-	15 Unit		0,00	0,00	638.880.000,00	638.880.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-					70.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					25 Unit	28 Unit		97.692.000,00	97.692.000,00	58.887.200,00	-38.804.800,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PAJAK DAERAH	-	-					97.711.760,00	DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.07.0009		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1 Unit	1 Unit		3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	-3.000.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	LAMPILAN PAD YANG SAM	-	-					3.000.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah						-	-		554.129.425,00	520.729.425,00	969.811.625,00	15.682.200,00			-	-		Pegawai Non ASN dan Sarana Listrik dan Air DPPKB Kab. Muba			652.111.625,00	DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Laporan	1 Laporan		223.182.825,00	223.182.825,00	223.182.825,00	0,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PAJAK DAERAH	-	-					223.182.825,00	DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Bulan	12 Bulan		330.946.600,00	297.546.600,00	346.628.800,00	15.682.200,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-					428.928.800,00	DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah						-	-		301.044.000,00	301.044.000,00	301.044.000,00	0,00			-	-		Inventaris Kantor DPPKB Kab. Muba			286.990.000,00	DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya					6 Unit	6 Unit		224.070.000,00	224.070.000,00	224.070.000,00	0,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PAJAK DAERAH	-	-					260.150.000,00	DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Diperbaiki/Direhabilitasi					600 M2	600 M2		63.554.000,00	63.554.000,00	63.554.000,00	0,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PAJAK DAERAH	-	-					13.420.000,00	DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi					20 Unit	20 Unit		13.420.000,00	13.420.000,00	13.420.000,00	0,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PAJAK DAERAH	-	-					13.420.000,00	DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
2.	2.14.62	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS (15-49 Tahun) Jumlah peta persebaran penggunaan alat kontrasepsi Persentase stakeholder yang memahami kajian dampak kependudukan.					2,23 93 94 % % %	2,23 93 94 % % %		166.807.867,00	166.807.867,00	578.531.200,00	630.000.000,00			-	-					696.807.867,00	
2.14.02.2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Pemaduan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk					93 %	93 %		66.469.867,00	66.469.867,00	31.141.500,00	-35.328.367,00			-	-		Sekolah Siaga Kependudukan (SBK)			66.469.867,00	DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.01.0021		Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan					6 Kegiatan	6 Kegiatan		66.469.867,00	66.469.867,00	31.141.500,00	-35.328.367,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-					66.469.867,00	DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-						99.338.000,00	99.338.000,00	547.389.700,00	448.051.700,00			-	-	Kader Kampung KB, Kader KB Desa dan Tim Pendamping Keluarga (TPK)		629.338.000,00	DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga																		
	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga					-	1 Laporan	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	-			80.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga																		
	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedia					1 Dokumen	1 Dokumen	99.338.000,00	99.338.000,00	72.309.700,00	-27.028.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			99.338.000,00	DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																		
	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga					-	1 Laporan	0,00	0,00	235.080.000,00	235.080.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	-			250.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																		
	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB					-	1 Dokumen	0,00	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	-			200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
3.	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	-				-	-	1.916.400.001,00	1.916.400.001,00	7.140.180.896,00	5.628.194.205,00							7.844.594.206,00	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal					90,50 %	90,50 %	317.449.000,00	317.449.000,00	1.142.853.000,00	825.404.000,00			-	-	Masyarakat dan Pemangku Kepentingan dalam Kab. Muba		1.302.774.500,00	DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangsa Kencana																		
	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)					4 Jenis	4 Jenis	243.983.000,00	243.983.000,00	172.250.000,00	-71.733.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			287.774.500,00	DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana																		
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)					-	25 Buah	0,00	0,00	375.000.000,00	375.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	-			400.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																		
	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)					450 Orang	450 Orang	73.466.000,00	73.466.000,00	335.483.000,00	262.017.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	-			400.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																		
	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang					-	1 Dokumen	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	-			125.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal																		
	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan					-	1 Dokumen	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Prioritas Daerah 5 : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA Prioritas Daerah 6 : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA		0,00	DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh peja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																		
	Jumlah Organisasi yang Mendukung Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja					-	20 Organisasi	0,00	0,00	85.120.000,00	85.120.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	-			90.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB-PLKB)					94 %	94 %	133.116.200,00	133.116.200,00	2.008.978.000,00	1.875.861.800,00			-	-	Petugas Lapangan KB PPKBD dan Sub PPKBD di Kabupaten Musi Banyuasin		2.233.116.200,00	DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institut Masyarakat Pedesaan (IMP)																		
	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institut Masyarakat Pedesaan (IMP)					-	480 Orang	0,00	0,00	1.944.000.000,00	1.944.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	-			2.100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.02.0006	Facilitas Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)																		
	Jumlah Laporan Hasil Penunatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)					1 Laporan	1 Laporan	133.116.200,00	133.116.200,00	64.978.000,00	-68.138.200,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			133.116.200,00	DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga UPPKS)			30 Desa	30 Desa	176.285.000,00	176.285.000,00	90.006.500,00	-86.278.500,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			260.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)					30 Desa	30 Desa												
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia			30 Desa	30 Desa	160.842.320,00	160.842.320,00	130.000.000,00	-30.842.320,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-			320.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)			350 Orang	350 Orang	154.528.000,00	154.528.000,00	77.264.000,00	-77.264.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			154.470.000,00	DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					94 %	94 %	0,00	0,00	2.871.000.000,00	2.871.000.000,00			-	-	Keluarga Berisiko Stunting di Kab. Muba		2.800.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca saliv/kelahiran, Baduta/Balita)																		
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca saliv/kelahiran, Baduta/Balita)			-	1 laporan	0,00	0,00	1.305.000.000,00	1.305.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-			1.200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca saliv/kelahiran, Baduta/Balita)																		
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca saliv/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan			-	1 laporan	0,00	0,00	1.566.000.000,00	1.566.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-			1.600.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
J U M L A H								16.190.029.996,00	16.899.994.282,00	23.339.072.566,00	7.140.042.570,00							26.361.025.835,00	

BAB IV

PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 275 tahun 2021 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Banyuasin, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkedudukan sebagai unsur pendukung otonomi daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 adalah dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 sebagai acuan penyusunannya. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 yang berisi pedoman yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dibidang Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana, yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Permasalahan yang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Banyuasin yang perlu segera diselesaikan yaitu masih adanya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmetneed*) rendahnya pencapaian KB Baru MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang), jumlah keluarga prasejahtera dan KSI yang masih tinggi, jumlah tenaga PKB/PLKB yang jauh dari ideal, sekitar 8 desa/kelurahan dibina oleh 1 orang PKB/PLKB sedangkan idealnya 2 desa/kelurahan dibina oleh 1 orang PKB/PLKB, kedepannya perlu diambil tindak lanjut berupa memperluas jaringan dan tempat pelayanan KB diseluruh kecamatan dan desa, pemberian *reward* dalam rangka perolehan KB Baru khususnya Metode Kontrasepsi Jangka Panjang meningkatkan fungsi dari Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) yang baru dibentuk, melakukan usulan untuk penambahan PNS atau Pegawai Kontrak sebagai Penyuluh Keluarga Berencana / Petugas Lapangan KB.

Akhirnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Banyuasin disusun untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergi dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

SEKAYU, 25 JUNI 2025

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



MIRWAN SUSANTO, SE., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19751029 200003 1 002